

Literatur

Alfred, A. Ring & Jerome Dasso, *“Real Estat: Principles and Practises”*, New Jersey, Pracyise Hall Inc, Englewood Cliffs, 1981.

Budihardjo, Eko, *“Sejumlah Masalah Pemukiman Kota”*, Cetakan 2, Bandung, Alumni, 1992.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *“Hukum Tata Lingkungan”*, Cetakan 3, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *“Hukum Tata Lingkungan”*, Cetakan 14, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Haryadi, *“Tinjauan Tata Ruang dari Perspektif Hubungan Perilaku Manusia dan Lingkungan”*, Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL TIPE A), Yogyakarta, 2-14 Oktober 1995, 1995.

Heinz Frick, *“Arsitektur dan Lingkungan”*, Kanisius, Yogyakarta, 1988.

Raldi Hendro Koestoer, *“Perspektif Lingkungan Desa-Kota: Teori dan Kasus,”* UI Press, Cetakan Pertama 1997, Jakarta, 1997

Salim, Emil, *“Pembangunan Berwawasan Lingkungan ”*, Cetakan 1, Jakarta, LP3ES, 1986.





Nurjani, Emilya, *“Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Sebagai satu Kesatuan Ekosistem (Studi Kasus di Sub DAS Progo Hilir)”*, Tugas Hukum Lingkungan Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 1998.

Artikel

Perlindungan Sumberdaya Tanah Untuk Mendukung Kelestarian Pertanian Tangguh, Edisi Khusus Balitkabi No.10-1997, Malang, Makalah Seminar Balitkabi dan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Komisariat Daerah Jatim dan Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI) Komisariat Daerah Jatim.

Peraturan Perundang-undangan

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
2. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-undang Nomor: 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air



Pertanggungjawaban perusahaan real estat terhadap pembangunan berwawasan lingkungan :: Studi kasus di grup Damai Putra Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

WIJANARKO, Bagus Priyo, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

UNIVERSITAS
GAJAH MADA

9. Keputusan Presiden Nomor: 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung;

10. Peraturan Daerah Sleman Nomor: 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tingkat II Sleman.

